



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

SOSIALISASI

EVALUASI MANDIRI SPBE

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

Putussibau, 24 Agustus 2020



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Apa itu SPBE?

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Apa Evaluasi SPBE ?

Evaluasi SPBE Adalah

Suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



DASAR HUKUM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE

1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
2. Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
3. Surat Menpan RB Nomor : B/386/M.KT.03/2020, Perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE 2020;
4. **Minut SK Bupati Kapuas Hulu No.: Tahun 2020 Tentang Tim Evaluator Internal Penyelenggara Evaluasi SPBE Kab. Kapuas Hulu**
5. Petunjuk Teknis Evaluasi SPBE Tahun 2020.



TUJUAN EVALUASI SPBE

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kegiatan untuk melakukan sebuah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2020 adalah sebagai berikut :

TUJUAN



CAPAIAN KEMAJUAN

Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



SARAN PERBAIKAN

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



MENJAMIN KUALITAS

Menjamin kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

PELAKSANAAN

Tahun 2020:
130 K/L/Pemda

Kerja sama dengan 6 Perguruan Tinggi:
UI, UGM, PENS, Telkom-U, UG, dan ITS



RUANG LINGKUP

RUANG LINGKUP PEDOMAN EVALUASI SPBE MELIPUTI:

1. Penilaian tingkat organisasi mencakup Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota);
2. Penilaian domain mencakup **KEBIJAKAN** internal SPBE, **TATA KELOLA** SPBE, dan **LAYANAN PUBLIK** SPBE.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

HASIL SURVEY

E-GOVERNMENT DEVELOPMENT INDEX (EGDI)

Yang diselenggarakan oleh United Nations menunjukkan bahwa Indonesia berada dirangking **88** dari **193** Negara di tahun 2020.

Annex Table 2. E-Government Development Index (EGDI)

Country	EGDI Level	Rating Class	Rank	EGDI	Online Service Index	Telecommunications Infrastructure Index	Human Capital Index
Estonia	Very High EGDI	VH	3	0.9473	0.9941	0.9212	0.9266
Eswatini	Middle EGDI	MH	128	0.4938	0.4882	0.3539	0.6392
Ethiopia	Middle EGDI	M1	178	0.274	0.3647	0.1194	0.3378
Fiji	High EGDI	H3	90	0.6585	0.5059	0.6468	0.8227
Finland	Very High EGDI	VH	4	0.9452	0.9706	0.9101	0.9549
France	Very High EGDI	V3	19	0.8718	0.8824	0.8719	0.8612
Gabon	High EGDI	H1	113	0.5401	0.3235	0.625	0.6719
Gambia (Republic of The)	Middle EGDI	M1	181	0.263	0.0294	0.3967	0.363
Georgia	High EGDI	HV	65	0.7174	0.5882	0.6923	0.8717
Germany	Very High EGDI	V3	25	0.8524	0.7353	0.8856	0.9362
Ghana	High EGDI	H2	101	0.596	0.6353	0.5596	0.593
Greece	Very High EGDI	V2	42	0.8021	0.7059	0.81	0.8905
Grenada	High EGDI	H2	102	0.5812	0.3412	0.5449	0.8576
Guatemala	High EGDI	H1	121	0.5155	0.5118	0.4828	0.552
Guinea	Middle EGDI	M1	183	0.2592	0.2176	0.3008	0.2591
Guinea-Bissau	Low EGDI	LM	186	0.2316	0.0647	0.2037	0.4265
Guyana	Middle EGDI	MH	129	0.4909	0.4647	0.3619	0.6462
Haiti	Middle EGDI	M1	180	0.2723	0.1882	0.2449	0.3839
Honduras	Middle EGDI	MH	138	0.4486	0.4647	0.3244	0.5568
Hungary	Very High EGDI	V1	52	0.7745	0.7471	0.7255	0.8509
Iceland	Very High EGDI	VH	12	0.9101	0.7941	0.9838	0.9525
India	High EGDI	H2	100	0.5964	0.8529	0.3515	0.5848
Indonesia	High EGDI	H3	88	0.6612	0.6824	0.5669	0.7342
Iran (Islamic Republic of)	High EGDI	H3	89	0.6593	0.5882	0.621	0.7686
Iraq	Middle EGDI	M3	143	0.436	0.3353	0.537	0.4358
Ireland	Very High EGDI	V3	27	0.8433	0.7706	0.81	0.9494
Israel	Very High EGDI	V2	30	0.8361	0.7471	0.8689	0.8924



PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

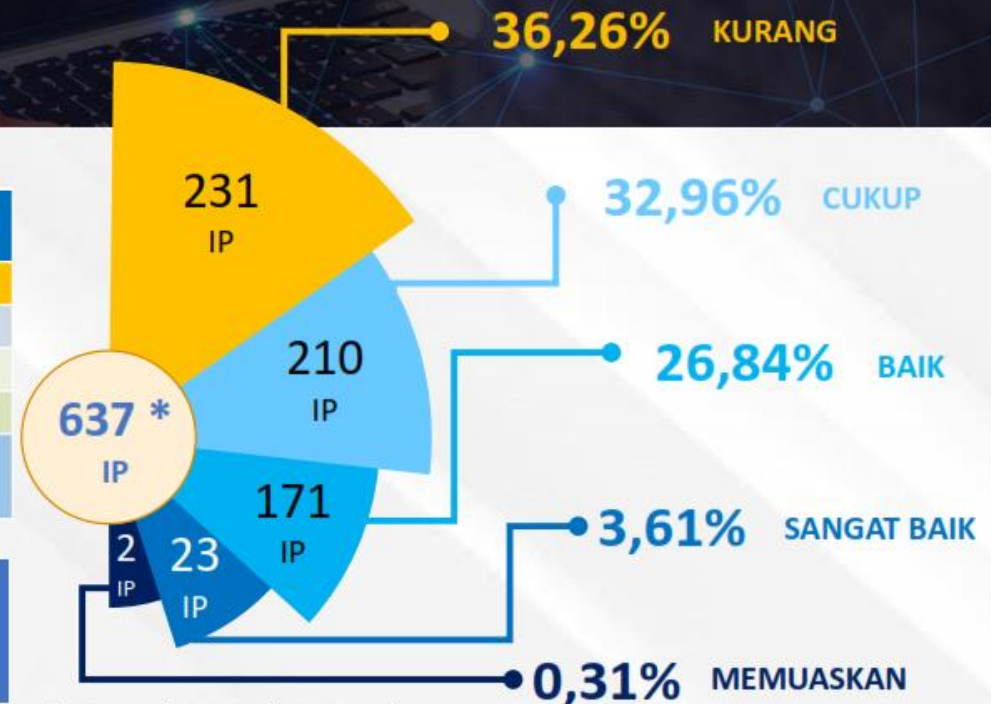
INDEKS SPBE NASIONAL



TABEL INDEKS SPBE

Deskripsi	2018	2019	Peningkatan
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	0,20
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	0,20
Indeks Domain Tata Kelola	1,75	1,87	0,12
Indeks Domain Layanan	2,18	2,40	0,22
Jumlah IP Berpredikat "Baik" atau lebih tinggi	82 IP (13,31%)	196 IP (31,81%)	114 IP (18,51%)

Kegiatan Evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap 637 K/L/D menghasilkan Indeks SPBE Nasional Tahun 2019 sebesar 2,18 dengan predikat "Cukup".



*) Termasuk 34 Kepolisian Daerah



PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

INSTANSI INDEKS SPBE DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

Baik
Cukup
Kurang

Provinsi Kalimantan Barat

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 :
Nilai Indeks SPBE = **2.41**
Predikat Nilai = **Cukup**

NO.	KABUPATEN/KOTA	INDEKS	PREDIKAT
1	KOTA PONTIANAK	3.06	BAIK
2	KABUPATEN KAPUAS HULU	2.6	BAIK
3	KABUPATEN KUBURAYA	2.56	CUKUP
4	KABUPATEN SANGGAU	2.36	CUKUP
5	KOTA SINGKAWANG	1.9	CUKUP
6	KABUPATEN KAYONG UTARA	1.89	CUKUP
7	KABUPATEN LANDAK	1.88	CUKUP
8	KABUPATEN KETAPANG	1.73	KURANG
9	KABUPATEN BENGKAYANG	1.56	KURANG
10	KABUPATEN SAMBAS	-	-
11	KABUPATEN MEMPAWAH	-	-
12	KABUPATEN MELAWI	-	-
13	KABUPATEN SINTANG	-	-
14	KABUPATEN SEKADAU	-	-

CATATAN:

Yang tidak muncul nilai indeks ada kemungkinan tidak dipublikasikan atau tidak mengikuti Evaluasi SPBE



PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



Tahap Perencanaan



SOSIALISASI

Sosialisasi evaluasi SPBE kepada Evaluator Internal 130 K/L/D.

EVALUASI MANDIRI

Pelaksanaan Evaluasi Mandiri secara daring melalui Aplikasi oleh Evaluator Internal (K/L/D);

Tahap Pelaksanaan



EVALUASI DOKUMEN

- Evaluasi dokumen oleh Evaluator Eksternal;
- Reviu

WAWANCARA

- Evaluator Eksternal melakukan klarifikasi hasil isian evaluasi mandiri K/L/D dengan metode wawancara dan memberikan penilaian
- Reviu

PELAPORAN

Perbaikan hasil reviu Kementerian PANRB
Penyusunan rekomendasi dan laporan masing-masing evaluator;
Pengolahan data dan penyusunan LHE.



ALUR PROSES EVALUASI MANDIRI K/L/D



1. Memahami Konsep

Tim evaluator internal memahami konsep dan metodologi evaluasi



2. Menyampaikan Bukti Dukung

Unit/Kerja atau perangkat daerah terkait, melalui Tim Evaluator Internal, memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung.



3. Verifikasi Bukti Dukung

Tim evaluator internal melakukan reviu/verifikasi terhadap data-data atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung.



4. Merumuskan Penilaian

Tim Evaluator Internal merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung.



5. Finalisasi Hasil

Tim Evaluator Internal, melalui Supervisor, menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada Sekretaris K/L/D untuk persetujuan.



6. Menyampaikan Hasil

Tim Evaluator Internal melalui Supervisor menyampaikan hasil evaluasi mandiri yang telah disetujui oleh Sekretaris K/L/D kepada Kementerian PANRB.



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

EVALUASI MANDIRI SPBE KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

METODOLOGI EVALUASI MANDIRI



TAHAP EVALUASI MANDIRI

PERENCANAAN

- Mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.

PELAKSANAAN

- Melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan/ atau observasi lapangan.

PELAPORAN

- Menyusun hasil penilaian dan seluruh bukti dukung, kemudian menyampaikan kepada Kementerian PANRB.



TAHAPAN PERENCANAAN

TAHAPAN PERENCANAAN BAGI K/L/D





TAHAP PELAKSANAAN



METODE PELAKSANAAN: EVALUASI MANDIRI K/L/D

Tim evaluator internal K/L/D melaksanakan evaluasi mandiri dengan menjawab pertanyaan, memberi tanggapan dan menyertakan bukti-bukti pendukung.



Evaluasi Dokumen

Tim Evaluator Internal K/L/D melakukan penilaian terhadap jawaban atau tanggapan dan bukti-bukti pendukung yang diberikan oleh Unit Kerja/ Perangkat Daerah terkait.



Wawancara

Tim Evaluator Internal K/L/D dapat menanyakan/klarifikasi kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait terhadap jawaban, penjelasan dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan.



Observasi Lapangan

Tim Evaluator Internal K/L/D dapat melakukan kunjungan/ visitasi ke Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait untuk melakukan validasi terhadap hasil penilaian, penjelasan dan bukti-bukti yang disertakan.





TAHAPAN PELAPORAN



- Evaluator Internal menyusun laporan evaluasi mandiri dan menyampaikan kepada Penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris K/L/D.
- Hasil evaluasi mandiri beserta berita acara telah disetujui/ditandatangani oleh sekretaris K/L/D disampaikan kepada Kementerian PANRB untuk ditindaklanjuti tahapan evaluasi eksternal.



TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D

Penanggung jawab (*Supervisor*)

Ditunjuk satu orang Pejabat dari Tim Evaluator Internal yang bertugas:

Mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;

Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;

Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal;

Bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.



TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D

ANGGOTA TIM EVALUATOR INTERNAL

Sekretaris K/L/D menetapkan Tim Evaluator Internal yang terdiri dari Pejabat/pegawai yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan indikator-indikator evaluasi SPBE, antara lain:

- Proses bisnis pemerintahan;
- Organisasi dan ketatalaksanaan;
- Hukum;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Perencanaan;
- Akuntabilitas kinerja;
- Penganggaran;
- Keuangan;
- Pengadaan;
- Kepegawaian;
- Kearsipan;
- Pengawasan;
- Pelayanan publik.



TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D

TUGAS UTAMA

Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;

Mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB;

Melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;

Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan di lingkungan internal K/L/D;

Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah.



TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D

Pelaksana entri data (*Operator*)

Ditunjuk satu orang Pejabat/Pegawai dari Tim Evaluator Internal yang bertugas:

Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung pada proses evaluasi mandiri;

Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;

Melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung pada kuesioner.



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

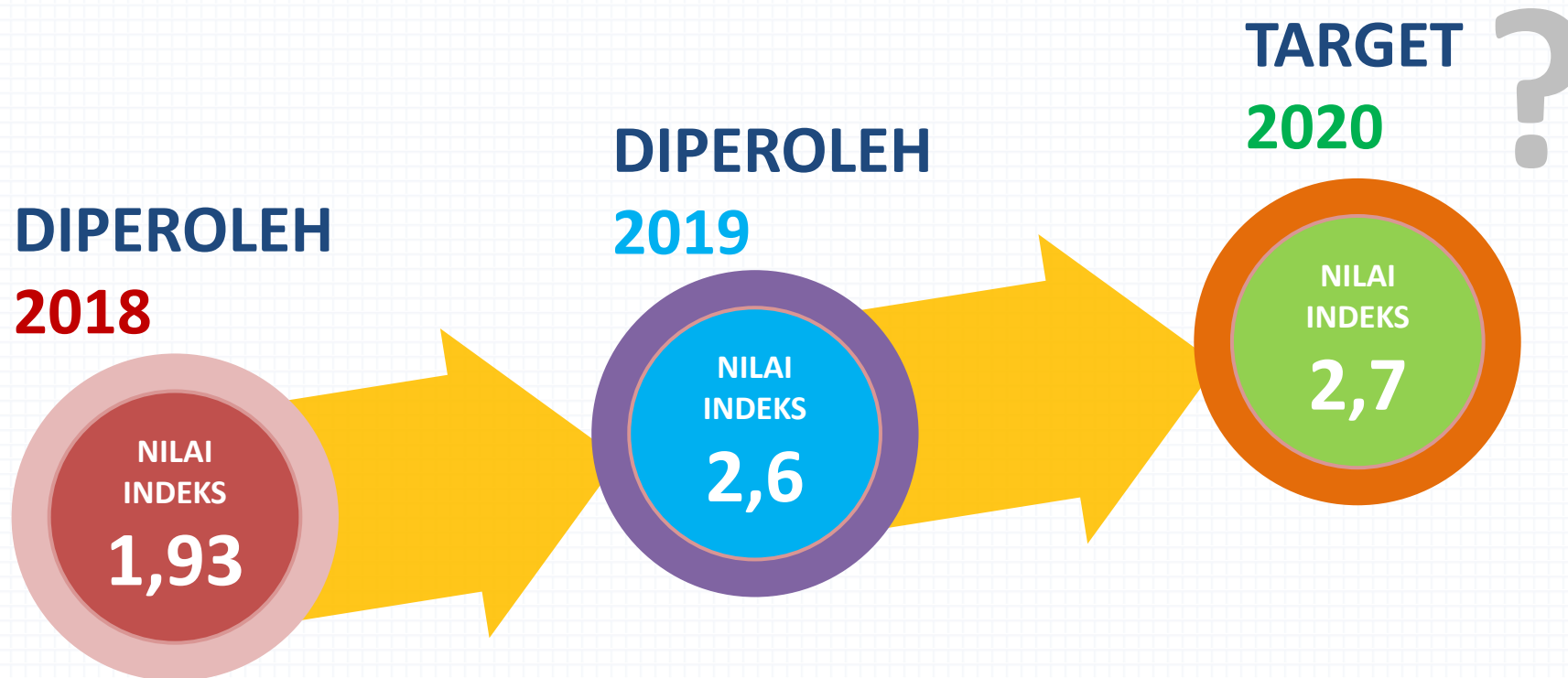


**HASIL EVALUASI SPBE
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2018 s/d 2019**



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NILAI INDEKS SPBE KAB. KAPUAS HULU





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

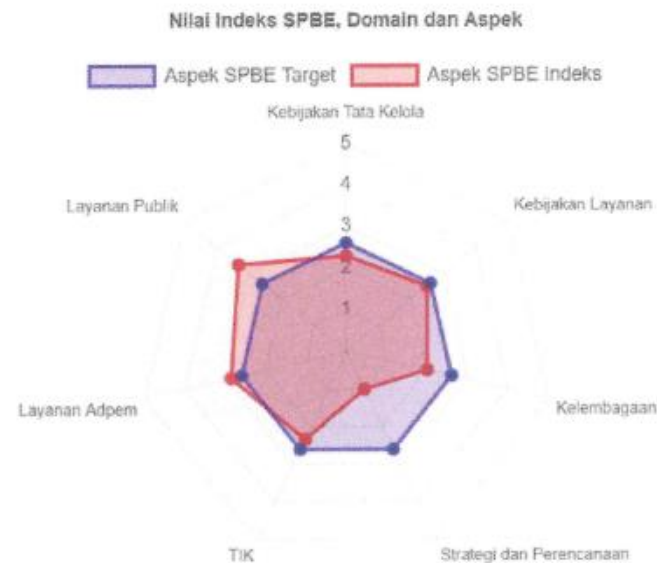
NILAI INDEKS SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

NILAI INDEKS SPBE 2019



(BAIK= 2,6)

NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK



Nama Instansi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

K/L/D

: Kabupaten

Daerah

: Kalimantan
Barat

Indeks SPBE

: 2.6

Predikat SPBE

: Baik

Domain Kebijakan SPBE

: 2.41

➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE

: 2.29

➔ Kebijakan Layanan SPBE

: 2.5

Domain Tata Kelola

: 1.86

➔ Kelembagaan

: 2.00

➔ Strategi dan Perencanaan

: 1.00

➔ TIK

: 2.33

Domain Layanan SPBE

: 3.03

➔ Administrasi Pemerintahan

: 2.86

➔ Pelayanan Publik

: 3.33



PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NILAI TINGKAT KEMATANGAN INDIKAROR SPBE KAB. KAPUAS HULU 2019

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)



No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
2	Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi	1
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	4
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	1
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	3
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	2
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	2
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	3
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	3
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	3
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	4



PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NILAI INDEKS SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	3
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
21	Anggaran dan Belanja TIK	1
22	Pengoperasian Pusat Data	2
23	Integrasi Sistem Aplikasi	2
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
25	Layanan Naskah Dinas	1
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	3
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	4
34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	1
35-1	Pelayanan Publik pada indikator 35-1	4
35-2	Pelayanan Publik pada indikator 35-2	3
35-3	Pelayanan Publik pada indikator 35-3	4



PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

RENCANA PENINGKATAN INDEKS SPBE KAB. KAPUAS HULU TAHUN

2020

NO	INDIKATOR	NILAI TINGKAT KEMATANGAN SPBE 2019	TARGET NILAI TINGKAT KEMATANGAN SPBE 2020
A.	DOMAIN KEBIJAKAN		
2.	Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi	1	2
4.	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	1	2
7.	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1	2
8.	Kebijakan layanan Naskah Dinas	1	2
9.	Kebijakan Internal <i>Whistle Blowing System</i>	1	2
B.	DOMAIN TATAKELOLA		
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1	2
20	Rencana Induk SPBE instansi Pemerintah	1	2
21	Anggaran dan Belanja TIK	1	2

[illegible]



PEMETAAN KEBUTUHAN DATA DUKUNG EVALUASI SPBE TAHUN 2020

NO.	DOMAIN	OPD	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1.	KEBIJAKAN	DISKOMINFOTIK	5,6,7, 14 , 17	SURAT EDARAN, SK ,MoU, PERBUB, PERDA, SOP, KEGIATAN AUDIT/EVALUASI
		BAGIAN ORTAL	1,2, 8 , 12	
		BAPPEDA	3,4,10, 12 ,	
		BKD	10,11	
		DISPERPUSIP	8	
		BKPSDM	9	
		BAGIAN PBJ	13	
		BAGIAN HUKUM	15	
		INSPEKTORAT	16	
		BPBD	14	



PEMETAAN KEBUTUHAN DATA DUKUNG EVALUASI SPBE TAHUN 2020

NO.	DOMAIN	OPD	INDIKATOR	DATA DUKUNG
2.	TATA KELOLA	DISKOMINFOTIK	18,21,22,23,24	SCREENSHOT APLIKASI, ALAMAT URL, SK, SOP, JUKNIS, KEGIATAN AUDIT/EVALUASI
		BAGIAN ORTAL	19	
		BAPPEDA	20, 21	
		BKD	-	
		DISPERPUSIP	-	
		BKPSDM	-	
		BAGIAN PBJ	-	
		BAGIAN HUKUM	-	
		INSPEKTORAT	-	
		BPBD	-	



PEMETAAN KEBUTUHAN DATA DUKUNG EVALUASI SPBE TAHUN 2020

NO.	DOMAIN	OPD	INDIKATOR	DATA DUKUNG
3.	LAYANAN	DISKOMINFOTIK	32, 35-1, 35-2	SCREENSHOT APLIKASI, ALAMAT URL, SK, SOP, JUKNIS, KEGIATAN AUDIT/EVALUASI
		BAGIAN ORTAL	25	
		BAPPEDA	27, 28, 30	
		BKD	28, 29	
		DISPERPUSIP	25	
		BKPSDM	26	
		BAGIAN PBJ	31, 35-3	
		BAGIAN HUKUM	33	
		INSPEKTORAT	34	
		BPBD	32	



TRIK MENINGKATKAN INDEKS SPBE KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2020

DOMAIN	LEVEL	SASARAN INDIKATOR	KETERANGAN
KEBIJAKAN DAN TATAKELOLA	1	Rintisan	Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tatakelola
	2	Terkelola	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan diinstansi pemerintah serta proses tatakelola dilaksanakan dengan dasar management terdokumen
	3	Terstandarisasi	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dan proses tatakelola dilaksanakan dengan sepenuhnya dengan standarisasi
	4	Terintegrasi dan terukur	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antara instansi pemerintah serta proses tatakelola dilaksanakan secara kuantitatif
	5	Optimum	Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal secara proses tatakelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas



TRIK MENINGKATKAN INDEKS SPBE KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2019

DOMAIN	LEVEL	SASARAN INDIKATOR	KETERANGAN
LAYANAN	1	Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
	2	Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk dua arah
	3	Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran Informasi dan layanan
	4	Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan Layanan SPBE lainnya
	5	Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

DATA DUKUNG INDEK SPBE

DOMAIN	DATA DUKUNG INDEK SPBE
KEBIJAKAN	1. Perda, Perbub, SK cth : SK Tim Koordinator SPBE, Tim Teknis SPBE, Tim Pengarah SPBE, SK Evaluasi SPBE dll 2. MoU 3. Rencana Induk/Master Plan. dll
TATAKELOLA	1. Tugas dan Fungsi Tim Pelaksanaan 2. Proses Bisnis/SOP Pelaksanaan 3. Nama Aplikasi 4. Alamat/URL Aplikasi 5. Proses Aplikasi (screenshot Tampilan Utama Aplikasi sampai Proses Akhir Aplikasi) 6. Kalaborasi Aplikasi (aplikasi yg melibatkan OPD lain) 7. Evaluasi (cth: target yg dicapai, perbaikan aplikasi dll)
LAYANAN PUBLIK	1. Tugas dan Fungsi Tim Pelaksanaan 2. SOP Pelaksanaan 3. Nama Aplikasi 4. Alamat/URL Aplikasi 5. Proses Aplikasi (screenshot Tampilan Utama Aplikasi sampai Proses Akhir Aplikasi) 6. Kalaborasi Aplikasi (aplikasi yg melibatkan OPD lain) 7. Evaluasi (cth: target yg dicapai, perbaikan aplikasi dll)

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%
Sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Unduh Disini		



*Thank
you!*